



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK)
BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Papua Tahun 2021 dapat tersusun. LAK ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK RI. LAK tahun 2021 ini berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kerjanya dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun 2021.

Hasil pengukuran realisasi anggaran terhadap pelaksanaan 13 Target IKU BPK Perwakilan Provinsi Papua yang telah ditetapkan dalam dokumen PKPK tahun 2021, adalah sebesar Rp46.195.599.442,00 (98, 29%) dari total anggaran sebesar Rp47.000.899.000,00.

Dari hasil analisis pengukuran tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan pada Tahun 2022 yaitu tingkat penerapan manajemen pengetahuan (termasuk penyusunan dan penerapan *best practice*), persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi.

Akhir kata, tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua sebagai lembaga negara yang mendapat mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, hanya dapat dilaksanakan dengan mewujudkan BPK Perwakilan Provinsi Papua yang bebas, mandiri, dan profesional. Di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Papua akan terus meningkatkan perannya untuk mewujudkan visi BPK menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

Jayapura, 28 Januari 2022

Kepala Perwakilan,



Arjuna Sakir

NIP.19680608 199803 1006

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua.....	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua.....	3
D. Sumber Daya dan Anggaran BPK Manusia (SDM) Perwakilan Provinsi Papua.	5
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA.....	6
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Papua.....	6
B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Papua.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA).....	9
BAB IV PENUTUP.....	15
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 – Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Papua 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana Tugas Pemeriksaan BPK yang salah satu diantaranya adalah Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI). AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Departemen Pendidikan Nasional, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dalam

pelaksanaan tugasnya, Ditama Revbang didukung oleh Perwakilan Provinsi Papua selaku unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.

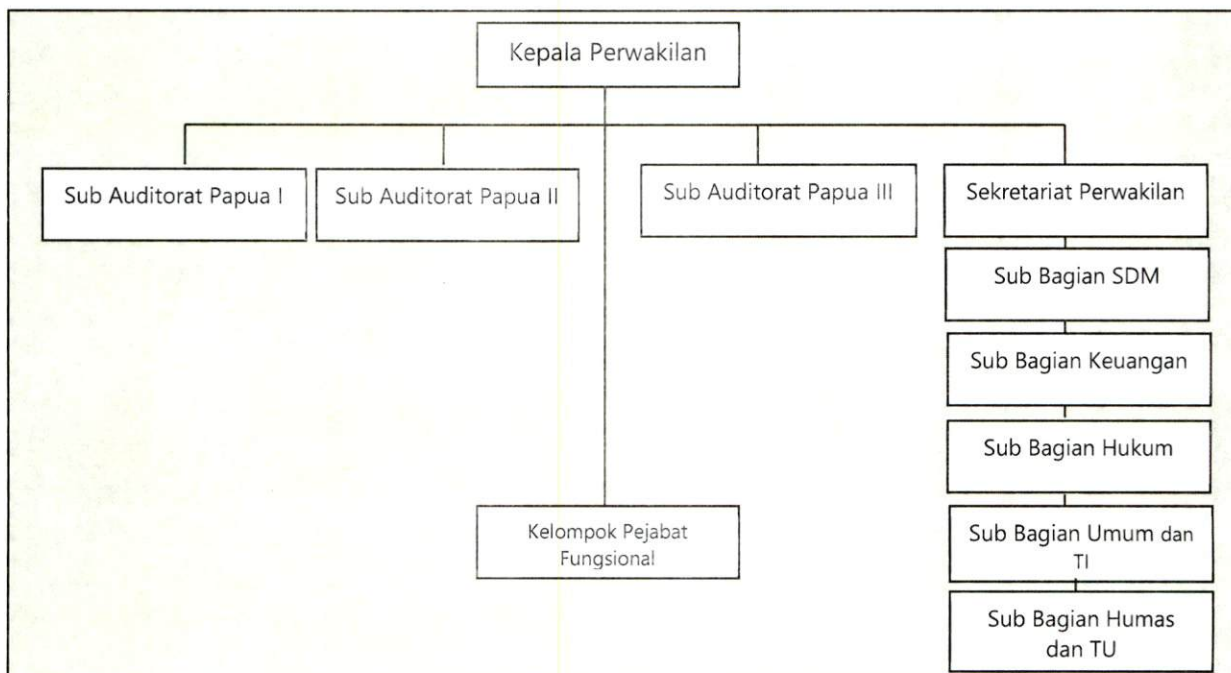
Perwakilan Provinsi Papua memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Papua, Kota/Kabupaten di Provinsi Papua, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPK Perwakilan Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan Pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Papua dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan kinerja berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK.
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Papua berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Papua.
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Papua, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- d. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Papua, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- e. Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.
- f. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Papua.
- g. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPR tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Papua.
- h. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum.
- i. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada penegak hukum.
- j. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- k. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Papua yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaan pemangku kepentingan dimaksud.
- l. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas BPK Perwakilan Papua, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK.
- m. Pengelolaan sumber dana manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum.
- n. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI.
- o. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Papua

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I.VIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tanggal 3 Februari 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Unit kerja BPK Perwakilan Provinsi Papua dijelaskan sebagai berikut.

a. Sub Auditorat Papua I

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Tolikara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

b. Sub Auditorat Papua II

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Biak Numfor, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

c. Sub Auditorat Papua III

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Asmat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

d. Sekretariat Perwakilan

Bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi Perwakilan Provinsi Papua.

D. Sumber Daya dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Papua

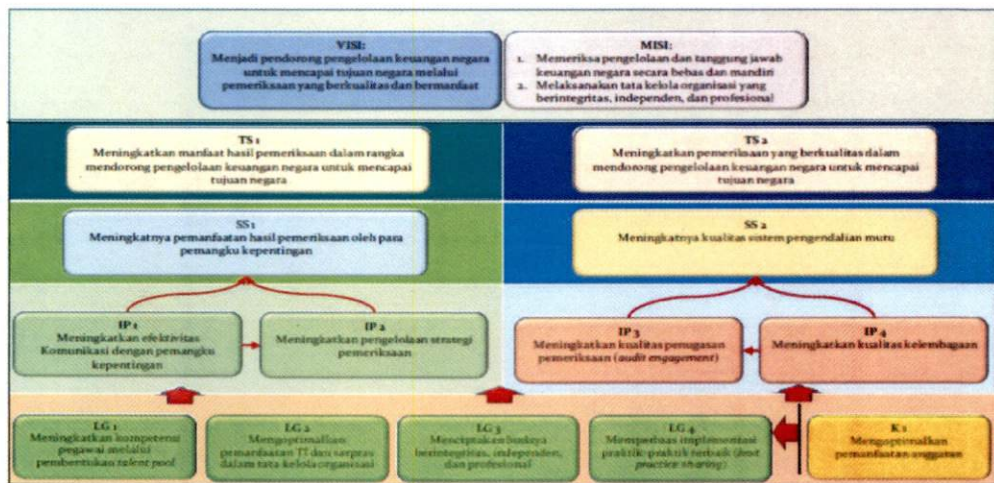
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Papua berjumlah 258 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, Kasetlan belum ada, 3 orang Kepala Sub Auditorat, 5 orang Kepala Sub Bagian, 111 Orang Pemeriksa Pertama, 19 Orang Pemeriksa Muda, 2 orang Pemeriksa Madya, 91 orang Administrasi Umum (termasuk CPNS) orang, 26 orang PPNPN.

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Papua untuk tahun 2021 sebesar Rp47.000.899.000,00.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN
PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK)
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA

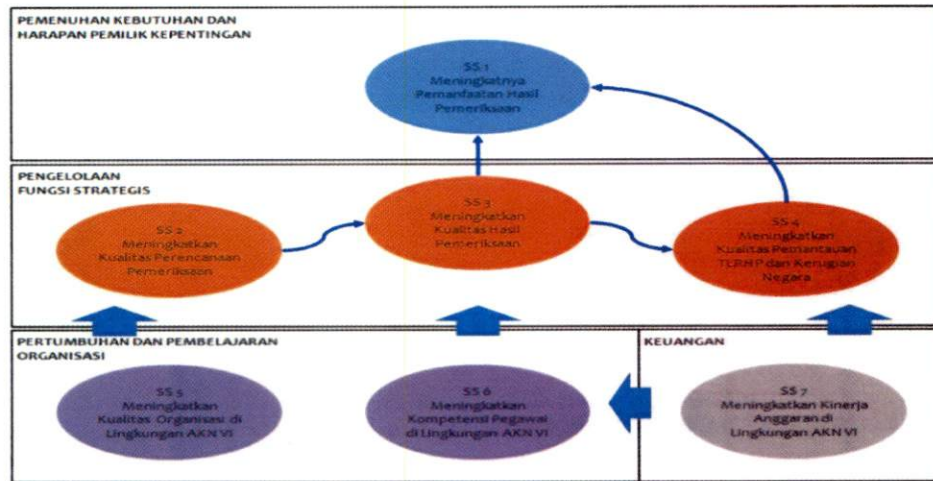
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Papua

BPK menetapkan 2 Sasaran Strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK *Wide* sebagai berikut:



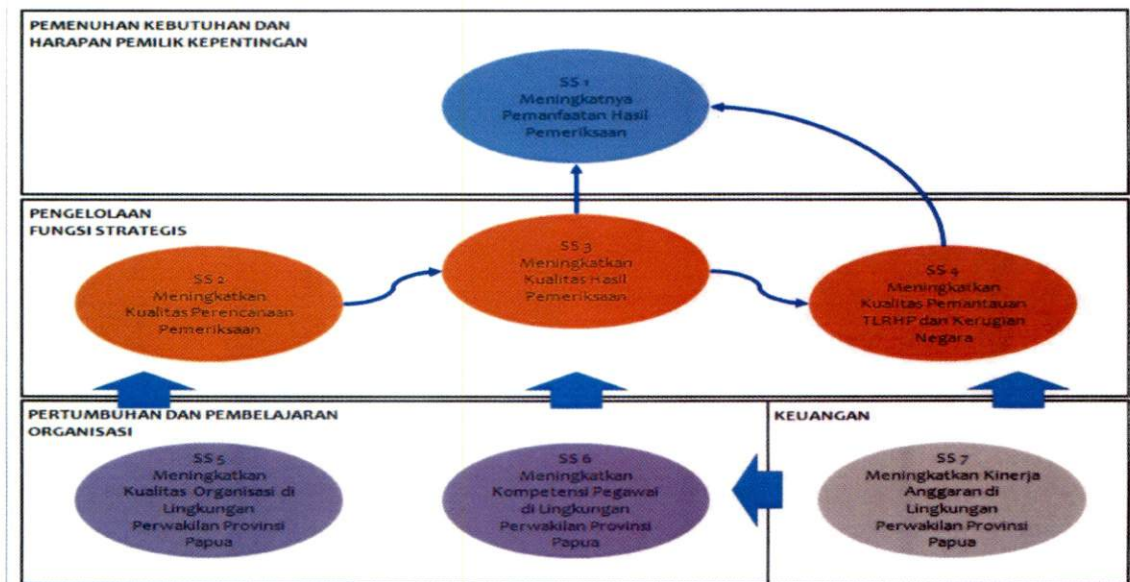
Gambar 2.1 – Peta Strategis BPK Wide

Keterkaitan tugas dan fungsi Auditorat Keuangan Negara VI dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis Auditorat Keuangan Negara VI berikut ini:



Gambar 2.2 – Peta Strategis AKN VI

Keterkaitan tugas dan fungsi Perwakilan Provinsi Papua dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis Perwakilan Provinsi Papua berikut ini:



Gambar 2.3 – Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Papua

B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Papua

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Perwakilan Provinsi Papua telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja

(PKPK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Papua selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara VI).

Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU Perwakilan Provinsi Papua Tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 1		Indikator Kinerja 2	Target 3
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan 3,80
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%

Tabel 2.1 – Sasaran Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi Papua

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN PROVINSI PAPUA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA PERWAKILAN PROVINSI PAPUA)

BPK Perwakilan Provinsi Papua pada Tahun 2021 telah melaksanakan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung terpenuhinya sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan. Hasil skor pencapaian kinerja Tahun 2021 sebesar **93,17 point**, dengan penjelasan masing-masing IKU seperti pada tabel berikut.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2021	SKOR	SKOR KINERJA	
1	2	3	4	6	7	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	91,67 %	91,67%	93,17
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00	
	3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	63,70%	84,90	
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100,00	
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100,00	
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100,00	
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,38	87,80	
	8	Hasil Evaluasi APSP	A (87,00)	92,86	105,00	
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	99,52%	103,67	
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25%	25,00	
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,68	96,84	
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	78,92%	78,92	
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%	88,27%	100,88	

Tabel 2.2 – Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Capaian Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi Papua Tahun 2021

Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua per indikator IKU ada yang mengalami peningkatan dari target, namun masih ada juga yang belum mencapai target. Gambaran rinci masing-masing indikator jelaskan sebagai berikut.

1. IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Tahun 2021 tagret IKU 1 adalah 100% dengan pencapaian 91,67 % atau belum mencapai target sebesar 8,33%. Belum tercapainya target IKU ini disebabkan antara lain hasil evaluasi EPP masih ditemukan adanya inkonsistensi dan tidak akuratnya tulisan temuan dalam LHP. Hal ini akan menjadi perhatian pada pemeriksaan tahun 2022.



2. IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Tahun 2021 tagret IKU 2 adalah 100% dengan pencapaian 100 % atau sesuai target. IKU ini tercapai karena BPK Perwakilan Provinsi Papua telah melaksanakan seluruh obyek pemeriksaan yang direncanakan dalam RKP, yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.



Dalam RKP obyek pemeriksaan yang direncanakan sebanyak 77 obyek pemeriksaan dimana terhadap seluruh obyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaannya telah diserahkan kepada entitas.

3. IKU 3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Tahun 2021 tagret IKU 3 adalah 75% dengan pencapaian 63,70%, atau belum sesuai target sebesar 11,03 %. Capaian tahun ini turun 1,8 point dari capaian Tahun 2020 (65,5%).

BPK Perwakilan Provinsi Papua terus mendorong optimalisasi penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK melalui kegiatan pertemuan antara BPK dengan para Kepala Daerah dan seluruh OPD.

Belum tercapainya taget IKU ini disebabkan antara

- Keterbatasan jaringan internet di Papua yang menyebabkan penggunaan SIPTL belum maksimal;
- Temuan-temuan lama terutama yang signifikan sulit diselesaikan karena pihak-pihak yang diserukan dalam LHP sulit ditemui oleh Pemda;
- Pelaksanaan pembatasan penerbangan di Papua Tahun 2021 akibat Pandemi Corona menyebabkan pembahasan tatap muka tidak dapat dilakukan secara periodik sebagaimana lazimnya;
- Penerapan protokol kesehatan khususnya kewajiban melaksanakan karantina mandiri apabila bepergian menyebabkan serta pelaksanaan penerapan WFH dan WFO di Pemda mempengaruhi capaian penyelesaian IKU 3.

4. IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Tahun 2021 tagret IKU 4 adalah 100% dengan pencapaian 100%, atau sesuai target. BPK Perwakilan Papua Tahun 2021 merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional dengan focus utama pada vaksinasi, Vokasi dan Pilkada Serentak.



5. IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan

Tahun 2021 tagret IKU 5 adalah 100% dengan pencapaian 100 %, atau sesuai target. Namun demikian, capaian tahun ini disebabkan karena tidak ada permintaan pemeriksaan oleh stakeholder BPK.

6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Tahun 2021 tagret IKU 6 adalah 100% dengan pencapaian 100%, atau sesuai target. BPK Perwakilan Papua Tahun 2021 merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal yaitu Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Kabupaten Sarmi, Kepulauan Yapen, Boven Digoel, Deiyai dan Keerom.



7. IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Tahun 2021 tagret IKU 7 adalah 5.00 (sangat memuaskan) dengan pencapaian 4,39 atau belum sesuai target sebesar 0,63 point. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 4,38 maka ada penurunan sebesar 0,01 point. Penyebab menurunnya belum diketahui karena pemangku IKU ini tidak diperwakilan BPK Papua tetapi oleh Unit Kerja Lainnya dan pelaksanaannya dilakukan melalui survei dari pihak eksternal. Namun pimpinan selalu memberi arahan kepada pelaksana BPK agar terus menjunjung tinggi nilai dasar BPK yaitu Independensi, Integritas dan Profesionalisme.



8. IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP

Tahun 2021 tagret IKU 8 adalah A (87,00) dengan pencapaian 92,86 atau melebihi target sebesar 5,86 point. Dengan demikian maka bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 sebesar 85,05 maka capaian Tahun 2019 telah terjadi peningkatan sebesar 7,81 point.

9. IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Tahun 2021 tagret IKU 9 adalah 96 % dengan pencapaian 99,52 % atau melebihi target sebesar 3,52 point. Pencapaian target IKU 2020 antara lain disebabkan tingginya akses penggunaan internet selama penerapan WFH dan WFO dalam pelaksanaan tugas dilingkungan BPK selama terjadinya pandemi Covid-19. Salah satunya adalah melaksanakan video konferense entry dan exit meeting pemeriksaan LKPD Tahun 2020 antara Kepala Perwakilan BPK Papua selaku penanggungjawab pemeriksaan dan kepada daerah.

10. IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Tahun 2021 tagret IKU 10 adalah 100 % dengan pencapaian 25% atau kurang dari target sebesar 75 % . Ketidaktercapaian ini disebabkan karena BPK Perwakilan Papua belum mengajukan *best bractice* maupun mereplikasi *best practice*. Capaian 25 % berasal dari penilaian atas Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP) di BPK Papua.



11. IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tahun 2021 target IKU 11 adalah 3,80 dengan pencapaian 3,68 atau kurang dari target sebesar 12 poin. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020 maka ada peningkatan dari 3,40 point menjadi 3,68 point atau terjadi peningkatan 28 pont.

12. IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Tahun 2021 tagret IKU 12 adalah 100% dengan pencapaian 78,92% atau kurang dari target sebesar 21.08 %. Penyebab ketidaktercapaian antara lain karena jadwal pelaksanaan diklat yang bertepatan dengan penugasan serta beberapa usulan diklat yang pesertanya sudah diajukan namun tidak dipanggil untuk mengikuti diklat.



13. IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran

IKU ini merupakan upaya Perwakilan Provinsi Papua dalam mendukung pengelolaan keuangan BPK yang efisien, efektif dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Tahun 2021 tagret IKU 13 adalah 87,50% dengan pencapaian sebesar 88,27 % atau melebihi target sebesar 0,77 point.

BAB IV PENUTUP


LAK Perwakilan Provinsi Papua ini merupakan sumbangan penyusunan LAKIP Auditorat Keuangan Negara VI sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Dalam pelaksanaan IKU Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Papua belum seluruhnya memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan. Beberapa IKU yang belum tercapai antara lain tingkat penerapan manajemen pengetahuan (termasuk penyusunan dan penerapan *best practice*), persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi. Namun demikian BPK Perwakilan Provinsi Papua akan terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja tahun-tahun mendatang.

Penyusunan LAKIP BPK Perwakilan Provinsi Papua ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

Jayapura, 28 Januari 2022

Kepala Perwakilan



Arjuna Sakir

NIP.19680608 199803 1006